EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

DISERTASI

Oleh

BLUCER WELINGTON RAJAGUKGUK 2007190025



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 2023

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

BLUCER WELINGTON RAJAGUKGUK 2007190025



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA 2023



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Blucer Welington Rajagukguk

NIM

: 2007190025

Program Studi

: Hukum Program Doktor

Fakultas

: Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT":

- Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, o5 Oktober 2023

Blucer Welington Rajagukguk

NIM: 2007190025



PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT Oleh:

Nama

: Blucer Welington Rajagukguk

NIM

: 2007190025

Program Studi

: Hukum Program Doktor

Konsentrasi

: Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 05 Oktober 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

NIP/NIDN: 191690/9990463325

Co Promotor I

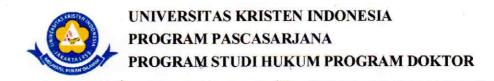
Co Promotor II

Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 951400/0321107202

Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.

NIP/NIDN:/861264/0310025801



PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal O5 Oktober 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama

: Blucer Welington Rajagukguk

NIM

: 2007190025

Program Studi

: Hukum Program Doktor

Konsentrasi

: Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. d.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. (phrène
3	Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	3 Jafa Sial -
4	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Penguji	4. Miera
5	Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.	Penguji	- Cuff M
6	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji	7.



LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

Nama

: Blucer Welington Rajagukguk

NIM

: 2007190025

SKRISTENIN

Program Studi

: Hukum Program Doktor

Konsentrasi

: Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

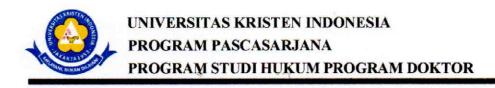
Jakarta, o5 Oktober 2023

Mengesahkan, Universitas Kristen Indonesia

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.

P/NIDN: 001473/0320 116402



Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Blucer Welington Rajagukguk

NIM

Fakultas

2007190025

Program Studi

Hukum Program Doktor Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir

: Disertasi

Judul

: EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM

PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT

Menyatakan bahwa:

 Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;

Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai

referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan,mengalih media/format-kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memplubikasikan tugas akhiur saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menagggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, OS Oktober 2023

Blucer Welington Rajagukguk

NIM: 2007190025

185667320

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor: 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
 - b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
 - bahwa untuk penguji Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tantang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 - Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
 - b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
 - c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR **PROGRAM PASCASARJANA** UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMSETER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

Pertama

: Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;

Kedua

: Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;

Ketiga

: Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

dr.Bernadetha Nadeak NIP./NIDN.: 001473/0320116402

Tembusan:

- Rektor UKI; 1.
- 2. WRAI, WRSH, WRKP;
- 3. Kaprodi PDH;
- 4. Arsip

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERINTEGRITAS l. Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, ttp://www.pascasarjana.uki.ac.id.id

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

: 20 September 2023 Tanggal



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

No. Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	ifix
				1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua Penguji
			- 11	2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris / Promotor
		Dlucer Wellinston	EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK	EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK 3. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Co Promotor 1 (UI)
Kamis,		10.00 - 12.00 Rajagukguk	PEMERIKSAAN KEUANGAN	KEUANGAN 4. Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.	Co Promotor 2
2023		NIM. 2007190025	NEGARA DALAM KEADAAN S. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji
			DARCINAL	6. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji
				7. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Penguji Eksternal (UI)

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

AIP-KIDK.: 191690/9990463325 Ketua Program Studi Hukum Program Doktor

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. NIP. NIDN.: 001473/0320116402

Catatan:

Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka

Drescode:

: Baju Toga lengkap Penguji

Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasi

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERINTEGRITAS

JI. Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, ttp://www.pascasarjana.uki.ac.id.id

Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Mengetahui,

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas dari Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul : "EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT".

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono dan seluruh civitas akademika UKI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi ini. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Yang Amat Sangat Terpelajar, Prof. Dr. John Pieris, Promotor sekaligus Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum UKI yang telah membantu baik secara filosofis ilmu hukum maupun analisis logis dan kritis, serta membimbing penulis untuk menyelesaikan disertasi ini sesuai waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yang Amat Terpelajar, Dr. Dian Puji N. Simatupang, Co Promotor 1, yang telah memotivasi penulis untuk belajar kembali ilmu hukum, khususnya terkait keuangan negara sejak penulisan tesis saat magister sampai menuju penulisan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang Amat Sangat Terpelajar, Prof. Dr. Chontina Siahaan, yang telah menambahkan nuansa sosiologis dan keadilan terhadap penulisan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas partisipasi rekan-rekan muda yang memberi masukan dan bantuan teknis lainnya kepada Adinda Ida Bagus Tridarwata Yatnaputra, Adinda Muhammad Ramadhani, dan Adinda Muhammad Najib yang selalu meluangkan waktunya dan berdiskusi dengan Penulis. The best for last, Penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, Dr. Selvia Vivi Devianti yang selalu mendukung dengan penuh kasih. Juga kepada anakku, Mega Permata Rajagukguk, yang baru saja menyelesaikan Sarjana Ekonominya di Universitas Indonesia, Anakku kedua, Mutiara Permata Rajagukguk dan Anakku ketiga, Benaya Wellington Rajagukguk yang sedang melaksanakan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta anak bungsuku, Marvella Fidelia Rajagukguk yang baru saja memasuki masa SMA. Tanpa mengurangi rasa hormat, Penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama satu persatu setiap sahabat, rekan, dosen, dan lainnya yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu Penulis menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf yang tulus apabila ada tulisan yang kurang berkenan atau bahkan dianggap menyakiti para pihak. Sejujurnya Penulis hanya menyampaikan pandangan akademis dengan pengetahuan yang amat terbatas.

Besar harapan Penulis agar disertasi ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada perbaikan kualitas sistem hukum di Indonesia, terkhusus untuk memicu gagasan-gagasan baru demi kepentingan pengaturan hukum negara yang lebih berkeadilan dan bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana senantiasa memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan rakyat Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Salam damai selalu. Merdeka!!!.

Jakarta, 05 Oktober 2023

Blucer Welington Rajagukguk

NIM: 2007190025

DAFTAR ISI

Lemba	ır Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhirii
Lemba	r Persetujuan Tim Promotoriii
Lemba	ır Persetujuan Dewan Pengujiiv
Lemba	r Pengesahan Direktur PPsv
Lemba	ır Persetujuan dan Pernyataan Publikasi Tugas Akhirvi
Lemba	ır SK Dewan Pengujivii
	Pengantarx
	· Isixivi
Daftar	Gambarixv
Daftar	Singkatanxvi
Abstra	kxix
Abstra	ckxx
A.	Latar Belakang Masalah1
В.	Identifikasi Masalah20
C.	Rumusan Masalah21
D.	Tujuan Penelitian
E.	Kegunaan Penelitian23
F.	Metode Penelitian24
G.	Orisinalitas Penelitian

Н.	Sistematika Penulisan40
BAB I	II
A.	Kajian Teoritis41
1.	Teori Keuangan Negara43
2.	Teori Keadilan46
3.	Teori Sistem Hukum52
В.	Kajian Konseptual60
1.	Pengertian Politik Hukum60
2.	Day Indicated Water State County Will advantage County Will advantage County William County William County William County Will advantage County William Coun
3.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan egara65
4.	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara69
5.	Badan Pemeriksa Keuangan81
6.	Keadaan Darurat92
DAD	III
DAD I	11/
	2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
A.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan negara dalam Keadaan Darurat di Indonesia
	120
1.	
2.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3.	1 1 1 7 0 0
	Tahun 2020 Terhadap Pengelolaan Keuangan negara136
4.	
5.	Pasal 12 UUD 1945: "Keadaan Bahaya"161
В.	Kebijakan Pemeriksaan Keuangan negara dalam Keadaan Darurat di Indonesia
	185
1.	Kewenangan BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara185
2.	Kebijakan Pemeriksaan Keuangan negara dalam Keadaan Darurat yang Ditetapkan BPK
	188
3.	Dampak Kebijakan Pemeriksaan Keuangan negara dalam Keadaan Darurat Terhadap
Pe	eraturan Perundang-undangan196
C.	Kebijakan Politik Hukum Indonesia Atas Pengelolaan Dan Pemeriksaan
Keu	angan negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Teori Keuangan negara, Teori
	dilan, Dan Teori Sistem Hukum203
1.	
	egara Dalam Keadaan Darurat Menurut Teori Keuangan negara
2.	
	egara Dalam Keadaan Darurat Menurut Teori Keadilan212

3.	Kebijakan Politik Hukum Indonesia Atas Pengelolaan Dan Pemeriksaan Keuangan	
nega	ara Dalam Keadaan Darurat Menurut Teori Sistem Hukum	219
BAB IV	7	225
1. K	ahijakan Balitik Hukum Indonesia Atas Bangalalaan Dan Bemeriksaan	
	Kebijakan Politik Hukum Indonesia Atas Pengelolaan Dan Pemeriksaan	227
	ngan negara Dalam Keadaan Darurat	
a.	Kebijakan Politik Hukum Dalam Pembentukan Perpu No.1/2020	
b.	Kebijakan Politik Hukum Dalam Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020	
C.	Pengaruh Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum yang termuat dalam U	
No.2	2/2020 dan Kebijakan BPK atas Pemeriksaan Keuangan negara dalam Keadaan Daru 239	rat
	Dampak kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam	
keada	an darurat terhadap tujuan bernegara	. 246
3. U	Irgensi pembenahan kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan	
	a dalam keadaan darurat	.253
BAB V.		259
	2 2	
BAB VI	<u> </u>	276
	2 /100	
A. Si	impulan	276
	A CONTRACTOR AND A CONT	
B. S	aran	. 280
DAFTA	IR PUSTAKA	285
	96, 400	
	ARTA	
	AN BUKAN DI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Realisasi PC-PEN Tahun Anggaran 2021	7
Gambar 2 Respon Pemerintah Terhadap Pandemi 2020 - 2022	238
Gambar 3: Piramida Kedudukan PMP	268



DAFTAR SINGKATAN

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD-P APBD Perubahan

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P APBN Perubahan

APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

ARK Algemene Rekenkamer

AS Amerika Serikat

ASOSAI Asian Organization of Supreme Audit Institutions

Banggar Badan Anggaran

BI Bank Indonesia

BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

BUMN Badan Usaha Milik Negara

CEE Central and Eastern Europe

Covid Corona Virus Disease

DAU Dana Alokasi Umum

DMF Disaster Management Framework

DMR Disaster Management Risk

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EBITDA Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization

ECHR European Court of Human Rights

FGD Focus Group Discussion

GAM Gerakan Aceh Merdeka

Himbara Himpunan Bank Milik Negara

HPS Harga Perkiraan Sendiri

HTN Hukum Tata Negara

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

Intosai International Organization of Supreme Audit Institution

ISA International Standard on Auditing

JR Judicial Review

Kemenkeu Kementerian Keuangan

Keppres Keputusan Presiden

KPCPEN Komite PC-PEN

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KUR Kredit Usaha Rakyat

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

LPS Lembaga Penjamin Simpanan

MD3 MPR, DPR, DPRD dan DPD

MK Mahkamah Konstitusi

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat

OJK Otoritas Jasa Keuangan

PBJ Pengadaan Barang dan Jasa

PC-PEN Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permenkeu Peraturan Menteri Keuangan

Perpres Peraturan Presiden

Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PMP Pedoman Manajemen Pemeriksaan

PMPP Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan

PNM PT Permodalan Nasional Madani

PP Peraturan Pemerintah

PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

RUU Rancangan Undang-Undang

SAI Supreme Audit Institutions

SBSN Surat Berharga Syariah Negara

SDGs Sustainable Development Goals

SDVC Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

SiLPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

SPKN Standar Pemeriksaan Keuangan-negara

SUN Surat Utang Negara

TNI Tentara Nasional Indonesia

Tipikor Tindak Pidana Korupsi

UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah

UU Undang-Undang

UUD Undang-Undang Dasar

WHO World Health Organization

ABSTRAK

Penanganan keadaan darurat seharusnya dilakukan dengan mengintegrasikan politik hukum pengelolaan keuangan negara dengan standar pemeriksaannya. Sistem hukum yang berkeadilan dan efektif diperlukan dalam membuat regulasi untuk mengatasi kedaruratan. Selanjutnya, disaat masa darurat telah selesai, maka regulasi yang lahir dalam mengatasi kedaruratan seharusnya direkontruksi sehingga rumusan regulasi menjadi lebih berkualitas dan harmoni dengan regulasi lain yang diberlakukan saat kondisi negara telah normal kembali. Pada prinsipnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam keadaan darurat tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan tidak mengurangi wewenang pemeriksaan oleh BPK yang disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: (a) apakah kebijakan politik hukum Indonesia atas pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat sudah tepat menurut teori keuangan negara, teori keadilan, dan teori sistem hukum, (b) mengapa kebijakan politik hukum Indonesia atas pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat harus dibenahi, dan (c) bagaimana ius constituendum kebijakan politik hukum Indonesia atas pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat yang berkeadilan dikonstruksikan. Studi ini menerapkan metode penelitian normatif dan preskriptif, dengan penguatan hasil melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan terjadi ketidakharmonisan pengaturan dan implementasi hukum pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada saat darurat dan setelah normal, antara lain terkait pengadaan barang dan jasa dan prosedur pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, kebijakan politik hukum Indonesia belum menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan penegakan hukum terhambat dengan minimnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kualitas substansi dan budaya hukum dalam keadaan darurat maupun setelah masa darurat selesai.

Kata kunci: Politik Hukum, Keuangan negara, Keadaan Darurat.

ABSTRACT

Handling emergencies should be carried out by integrating the legal politics of managing state finances with auditing standards. A just and effective legal system is needed in making regulations to deal with emergencies. Furthermore, when the emergency period has ended, the regulations that were issued in dealing with emergencies should be reconstructed so that the formulation of regulations becomes of higher quality and harmony with other regulations that were enacted when the country's conditions returned to normal. In principle, the policy of managing state finances in emergencies still prioritizes the principles of accountability and transparency, without reducing the audit authority of the BPK which is adjusted to the emergency conditions that occur. This study discusses three main issues, namely: (a) is Indonesia's legal political policy on managing and auditing state finances in an emergency situation appropriate according to state finance theory. justice theory, and legal system theory, (b) why is Indonesia's legal political policy on management and auditing of state finances in an emergency must be addressed, and (c) how is the ius constituendum of Indonesian legal political policies on the management and auditing of state finances in a just state of emergency constructed. This study applies normative research methods and prescriptive, with the strengthening of the results through interviews. The results of the study concluded that there was disharmony in regulation and implementation of law in the management and responsibility of state finances during an emergency and after normalcy, among others related to the procurement of goods and services and inspection procedures during the Covid-19 pandemic. Furthermore, Indonesia's legal political policies have not created a sense of justice for all Indonesian people and law enforcement is hampered by the lack of public legal awareness and the lack of quality of substance and legal culture in emergencies and after the emergency period is over.

Keywords: Legal Politics, State Finance, Emergencies.